



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
KELURAHAN KAIRAGI DUA, KECAMATAN MAPANGET, KOTA MANADO, SULAWESI UTARA
(CTI CENTRE BUILDING)
<https://dkpd.sulutprov.go.id>; e-mail: sulutdkp@gmail.com
M A N A D O

Manado, 21 Agustus 2025

Nomor : 523/DKPD/PT/1916/2025
Sifat : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Pertemuan Reguler Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Provinsi Sulawesi Utara

Yth. **Terlampir**

di -

T e m p a t

Dalam rangka Pengelolaan Perikanan Tuna di Sulawesi Utara, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) dan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), akan mengadakan pertemuan reguler KPBP-Tuna Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025. Pertemuan ini akan membahas terkait isu-isu perikanan tuna terkini di Sulawesi Utara tentang implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) terutama tentang zona perikanan dan kuota penangkapan tuna. Sehubungan dengan hal tersebut maka diundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 26 Agustus 2025

Tempat : Fave Hotel Bitung

Waktu : 08.30 Wita

Mengingat pentingnya acara ini, kami mengharapkan agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu. Informasi lebih lanjut terkait kegiatan dapat menghubungi Sdri. Ruth Goni - DKPD Provinsi Sulawesi Utara (085343533500), Sdr. Novriansyah - MDPI (082340893920) dan Sdri. Nuriasih Nababan - AP2HI (085216042493).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Dr. Ir. TIENNEKE ADAM, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690212 199403 2 008

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
3. Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Utara.



Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

Pertemuan Reguler

Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP)-Tuna

Provinsi Sulawesi Utara

Bitung, 26 Agustus 2025

I. Latar Belakang

Sudah menjadi informasi umum bahwa Provinsi Sulawesi Utara, dengan Kota Bitung sebagai pusatnya dan masuk dalam **Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 dan 716**, memiliki sumber daya perikanan tuna, cakalang dan tongkol yang melimpah. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2023, produksinya mencapai **119.356 ton**. Potensi ekonomi yang masif ini menjadikannya tulang punggung perekonomian regional, sehingga pengelolaan yang berkelanjutan menjadi sebuah keharusan. Sejalan pula dengan visi tersebut, wilayah Sulawesi Utara sudah tersertifikasi ekolabel untuk alat tangkap Handline dan Pole and Line, yakni sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) dan Fair Trade USA (FTUSA). Hal ini sekaligus juga sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pasar dengan memenuhi permintaan pasar internasional akan produk lestari dan bertanggungjawab.

Untuk memastikan keberlanjutan sumber daya dan manfaat ekonomi ini, diperlukan pengelolaan yang efektif diantaranya melalui kolaborasi para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, industri, nelayan, hingga akademisi. Menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah (DKPD) telah membentuk Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) Tuna sejak tahun 2017 melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 390 Tahun 2017. Selama delapan tahun perjalanannya, forum ini telah menjadi wadah esensial untuk berdiskusi, berbagi informasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi bersama terkait isu-isu perikanan tuna.

Pada bulan Juni 2025 lalu telah diadakan pertemuan tahunan LPP WPP 713, 714 dan 715. Di WPP 715, salah satu yang menjadi resume dari pertemuan tersebut adalah sudah dilakukan simulasi penghitungan kuota nelayan lokal setiap provinsi di WPP 713, 714 dan 715, dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan PIT yang akan resmi dilaksanakan mulai Januari 2026. Kebijakan PIT bertujuan untuk memperkuat tata kelola perikanan nasional, namun implementasinya di tingkat tapak memunculkan serangkaian tantangan krusial yang perlu segera diantisipasi. Bagi perikanan tuna dan cakalang yang menjadi ciri khas Sulawesi Utara, muncul beberapa isu kritis, diantaranya:

1. **Hambatan Operasional:** WPP 715 dan 716 yang terletak pada zona PIT berbeda (Zona 2 dan Zona 3) sehingga kapal hanya bisa mendapatkan izin menangkap pada salah satu WPP berpotensi menghambat kapal yang secara historis beroperasi melintasi WPP 715 dan 716 menyesuaikan kondisi musim dan hasil tangkapan. Selain itu, sejak dibukanya perikanan jaring untuk WPP 715, secara signifikan menyulitkan operasional, menurunkan produksi bahkan menurunkan girah operasi perikanan PL di Sulawesi Utara.

2. **Status Pelabuhan Mandiri:** Pelabuhan Terminal Untuk Kebutuhan Sendiri (TUKS) yang sudah terqualifikasi perlu untuk bisa dijadikan sebagai pelabuhan pangkalan dalam kebijakan pelabuhan PIT, guna mendukung integrasi usaha perikanan hulu hilir dan mendukung peningkatan mutu hasil perikanan khususnya Tuna sehingga dapat membuat produk perikanan memiliki daya saing dikancah internasional dan domestik.
3. **Layanan Administrasi:** Proses penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang terkadang memakan proses yang lama berakibat pada terhambatnya klaim produk MSC dan FTUSA. Selain itu, syarat ekspor ke Uni Eropa cukup kompleks termasuk SHTI, namun perlu dipertimbangkan agar mempermudah dan mempercepat prosesnya sebagai bentuk upaya membuka pasar lain selain Amerika.
4. **Daya Saing Pasar:** Fluktuasi harga, tarif ekspor, dan tuntutan pemenuhan standar sertifikasi menjadi tantangan berkelanjutan bagi industri dan memerlukan strategi branding (misalnya: diperlukan ide Indonesian Tuna Price sebagaimana mencontoh yang sudah eksisting misalnya Bangkok Tuna Price). Selain itu, dirasa perlu juga bahwa pentingnya peranan pemerintah dalam mendukung pelaku usaha dalam digitalisasi UPI sehingga kedepan akan mendukung penerapan PIT, SHTI serta STELINA dalam upaya meningkatkan daya saing pasar.

Menjawab dinamika tersebut, DKPD Provinsi Sulawesi Utara, bekerja sama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) serta Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI), kembali menyelenggarakan Pertemuan Reguler KPBP Tuna. Pertemuan tahun ini dirancang secara khusus untuk menjadi platform dialog konstruktif guna **menjembatani kebijakan nasional dengan realitas operasional di daerah**. Agenda pertemuan akan fokus pada sosialisasi arah kebijakan PIT dan kuota, sekaligus mengidentifikasi dan membedah tantangan yang dihadapi industri terhadap pasar melalui diskusi terfokus.

Melalui pemaparan dari para ahli dan diskusi kelompok yang mendalam, pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif dan solusi praktis. Harapannya, strategi pengelolaan perikanan tuna dan cakalang di Sulawesi Utara dapat lebih terarah, selaras antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah, serta mampu meningkatkan daya saing industri di tengah dinamika pasar global yang terus berkembang.

II. Tujuan Pertemuan

Secara umum, pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan implementasi kebijakan perikanan nasional dengan kondisi operasional dan kebutuhan industri perikanan tuna di Sulawesi Utara demi mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Secara khusus, tujuan dari pertemuan ini adalah:

1. Mensosialisasikan sekaligus mendiskusikan arah kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan hasil simulasi kuota penangkapan ikan di WPP 715 kepada para pemangku kepentingan di Sulawesi Utara.
2. Mengidentifikasi tantangan dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk harmonisasi aturan PIT dengan karakteristik operasional perikanan *Pole & Line* dan *Handline* (terkait izin lintas WPP, status pelabuhan mandiri (TUKS) terqualifikasi, dan zona penangkapan).

3. Merumuskan usulan mekanisme implementasi kuota nelayan lokal yang partisipatif dan adil, serta strategi terobosan untuk percepatan dan kemudahan layanan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) untuk menjangkau pasar Uni Eropa.
4. Menghasilkan rekomendasi strategi untuk meningkatkan daya saing dan nilai tawar perikanan tuna Sulawesi Utara terkait penguatan branding melalui ide Indonesian Tuna Price, negosiasi pasar, dan pemenuhan standar sertifikasi ekolabel (MSC & FTUSA).

III. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pertemuan ini rencananya diadakan secara luring pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 26 Agustus 2025

Waktu : 08.30 WITA – selesai

Lokasi : **Favehotel Bitung**, Jalan Sam Ratulangi No.5, Bitung Bar. Dua, Kec. Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara 95522

IV. Agenda

Waktu	Deskripsi	Ket.	Penanggungjawab
08.00 - 08.30	Registrasi	30 menit	Panitia
08.30 - 09.15	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Pembacaan Doa 3. Sambutan Direktur MDPI 4. Sambutan Ketua AP2HI 5. Sambutan dan Pembukaan Acara oleh Ketua KPBP-Tuna Provinsi Sulawesi Utara 6. Sesi foto bersama	45 menit	1. MC 2. Pembaca Doa 3. Direktur MDPI 4. Ketua AP2HI 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulut 6. Panitia
09.15 - 09.30	Coffee Break	15 menit	MC
	Talkshow (moderator: Staf Khusus Gubernur Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara)		

I.

09.30 - 11.00	<p>Tema: Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan peningkatan perikanan HL dan PL di Bitung</p> <p>Panel Pemaparan: (Pengantar Moderator)</p> <p>Pengantar Moderator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan dari asosiasi industri tentang kebutuhan peningkatan perikanan PL dan HL ramah lingkungan di Sulawesi Utara (Zona PIT, Pelabuhan PIT, Indonesian Tuna Price, SHTI, Tarif US, Digitalisasi UPI, pendaftaran rumpon dll) 2. Sosialisasi hasil pertemuan LPP WPP 715 tentang penetapan kuota nelayan lokal untuk Provinsi Sulawesi Utara - WPP 715 dan penguatan data non pelabuhan. 3. Optimalisasi Peran Pelabuhan Perikanan untuk Percepatan Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Sulawesi Utara <p>Pembahas: Menanggapi materi pemaparan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan PIT dan Peningkatan Perikanan Tuna dan Cakalang HL dan PL di Perairan Sulawesi Utara (WPP 715 dan 716).</p>	<p>90 menit</p> <p>10 menit</p> <p>20 menit</p> <p>20 menit</p> <p>20 menit</p> <p>20 menit</p>	<p>1. Ketua AP2HI</p> <p>2. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara</p> <p>3. Direktorat Kepelabuhanan - KKP</p> <p>Pembahas: 1. Tenaga Ahli MKP Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan 2. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) - KKP</p>
11:00 – 12:00	Diskusi dan tanya jawab	60 menit	Moderator
12.00 - 13.30	Istirahat Shalat dan Makan siang		Panitia
	Focus Group Discussion (FGD)		
13.30 - 14.45	<p>FGD: Diskusi terfokus untuk penajaman dalam rangka menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret dan mendalam</p> <p>Pengantar Fasilitator FGD</p> <p>Topik kelompok 1: Harmonisasi kebijakan PIT dengan karakteristik operasional perikanan PL dan HL di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung peningkatan perikanan HL dan PL.</p>	<p>75 menit</p> <p>15 menit</p>	<p>Fasilitator utama: AP2HI dan MDPI</p>

	<p>=> Output: Usulan rencana aksi dan rekomendasi terbaik penyesuaian kebijakan PIT dengan kondisi operasional perikanan Sulut tentang lintas zona PIT (WPP 715, 716), Pelabuhan PIT dan Pelabuhan Mandiri (TUKS), dll.</p> <hr/> <p>Topik kelompok 2: Mekanisme implementasi kuota dan alur data penggunaan kuota yang partisipatif bagi nelayan lokal provinsi Sulawesi Utara.</p> <p>=> Output: Usulan rencana aksi dan rekomendasi tentang mekanisme implementasi kuota di tingkat lokal yang tepat dan berkeadilan untuk nelayan perorangan, kelompok, perusahaan di Sulut dan model pelaporan data penggunaan kuotanya.</p> <hr/> <p>Topik kelompok 3: Strategi terobosan percepatan layanan SHTI: identifikasi hambatan dan rekomendasi solusi di Pelabuhan Perikanan Sulawesi Utara</p> <p>=> Output: menghasilkan peta masalah alur SHTI saat ini dan draft rencana aksi dan rekomendasi terbaik alur proses SHTI yang lebih efisien, lengkap dengan usulan kebutuhan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM.</p> <hr/> <p>Topik kelompok 4: Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tawar Tuna Sulut melalui strategi branding (Indonesian Tuna Price), negosiasi tarif dan harga di pasar global dan sertifikasi ekolabel dan sosial (MSC dan FT).</p> <p>=> Output: Saran, masukan, rencana aksi dan rekomendasi terbaik terkait peluang dari rencana pembangunan Indonesian Tuna Price, negosiasi tarif dan harga di pasar global dan pemenuhan standard sertifikasi ekolabel dan sosial di Sulut.</p>	Masing-masing kelompok 60 menit	<p>Fasilitator kelompok: Kelompok 1: Tenaga Ahli/PSDI - KKP</p> <p>Kelompok 2: DKPD Sulut</p> <p>Kelompok 3: Dit. Kepelabuhanan - KKP/PPS Bitung</p> <p>Kelompok 4: Asosiasi Industri</p>
14.45 - 15.20	Presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok	35 menit	Ketua Kelompok Diskusi
15.20 - 15.50	<i>Shalat Ashar dan Coffee break</i>	30 menit	Panitia
15.50 - 16.15	Summary / Pembacaan Draft Resume dan Rekomendasi Pertemuan	25 menit	Panitia
16.15 - 16.30	Penutupan	15 menit	Panitia

V. Daftar Undangan

DAFTAR UNDANGAN

No.	Instansi	Jumlah Luring
1	Tenaga Ahli MKP Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan (Muhammad Abdi Suhufan)	1
2	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan – DJPT - KKP	1
3	Direktur Kepelabuhanan – DJPT – KKP	1
4	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara	1
5	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	1
6	Tim teknis pengurusan SHTI PPS Bitung	1
7	Kepala Syahbandar PPS Bitung	1
8	Kepala Pangkalan SDKP Bitung	1
9	Kepala Dinas DKP Kota Bitung	1
10	Kepala Dinas DKP Kabupaten Minahasa Utara	1
11	Sekretaris Dinas DKPD Provinsi Sulawesi Utara	1
12	Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKPD Prov. Sulawesi Utara	1
13	Kepala Bidang Penguatan Daya Saing DKP Provinsi Sulawesi Utara	1
14	Kepala Bidang PRL-PSDKP DKP Provinsi Sulawesi Utara	1
15	Kepala Kantor UPP Kelas III likupang Minahasa Utara	1
16	Kepala UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Tumumpa	1
17	Kepala UPTD Pelabuhan Wilayah 2 (Belang)	1
18	Kepala UPTD Pelabuhan Wilayah 3 (Kema)	1
19	Kepala UPTD Pelabuhan Wilayah 4 (Bolsel)	1
20	Kepala UPTD Pelabuhan Wilayah 1 Sangihe	1
21	JFT Pengelola Produksi Perikanan Tangkap DKPD Prov. Sulut	3
22	BPPMHKP Prov. Sulawesi Utara	1
23	Koordinator Eksekutif UPP, LPP WPPNRI 716 (Kalabu Bitung)	1
24	Koordinator Eksekutif UPP, LPP WPPNRI 715 (Ambon)	1
25	Staff Khusus Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bidang Kelautan dan Perikanan	1
26	Penyuluh Perikanan Kecamatan Wori	1
27	Kepala Desa Minaesa	1
28	Supporting Panitia (Dari DKPD Provinsi Sulawesi Utara)	3
29	Dekan FPIK Universitas Sam Ratulangi	1
30	Direktur Politeknik KP Bitung	1
31	Prof. Dr. Kawilarang Alex Masengi, M.Sc	1
32	Pimpinan AP2HI (Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia)	5
33	Ketua HNSI Provinsi Sulawesi Utara	1
34	Pimpinan PT. Bintang Mandiri Bersaudara	1
35	Pimpinan PT. Sinar Purefoods International	1
36	Pimpinan PT. Benteng Laut Sejahtera	1
37	Pimpinan PT. Nutrindo Fresfood Internasional & Supplier MSC	2
38	Pimpinan PT. Sari Tuna Makmur	1
39	Pimpinan PT. Chen Woo Fishery & Supplier MSC	2

40	Pimpinan PT. Marina Nusantara Selaras	1
41	Pimpinan PT. Samudra Mandiri Sentosa	1
42	Pimpinan PT. Intimas Surya	1
43	Pimpinan PT. Sari Usaha Mandiri	1
44	Pimpinan PT. Benua Omega Samudra	1
45	Pimpinan PT. Laut Biru Seafood	1
46	Pimpinan PT. Pahala Bahari Nusantara	1
47	Pimpinan PT. Tirta Bitung Bahari/Bahari Prima Manunggal	1
48	Pimpinan PT. Sinar Bulan Purnama	1
49	Pimpinan PT. Prima Erajaya Bahari	1
50	Pimpinan PT. Deho Canning Company	1
51	Pimpinan APSI Wilayah Sulawesi Utara	1
52	Supplier Desa Minaesa	1
53	Perwakilan Nelayan hand line tuna di Bitung (Member AP2HI)	1
54	Perwakilan nelayan Tuna Desa Minaesa	1
55	Woman Champion Minaesa	1
56	Perwakilan Nelayan Pole and Line Fair Trade	3
57	Yayasan MDPI (Masyarakat dan Perikanan Indonesia)	5
58	PT. Sahabat Laut Lestari	1
59	Yayasan IPNLF Indonesia	1
60	YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara)	1
61	Yayasan Kelola	1
62	Yayasan Manengkel	1
	Jumlah	76

VI. Pembiayaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan dukungan pembiayaan oleh Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) dan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI). Selama kegiatan berlangsung, panitia kegiatan akan membiayai tempat kegiatan, konsumsi, transportasi dan kebutuhan pertemuan, dengan detail pembiayaan sebagai berikut:

1. Penginapan (hotel) hanya disediakan bagi pemerintah, nelayan dan supplier yang berasal dari luar Kota Bitung. Penginapan/hotel Tidak disediakan bagi Peserta dari Kota Manado dan Kabupaten Minahasa.
2. Biaya transportasi lokal (bukan sewa mobil), tiket pesawat atau kapal laut harus diberikan nota aslinya kepada panitia.
3. Uang harian, mengikuti standar keuangan Yayasan MDPI
4. Bagi perusahaan, processing ikan, Asosiasi Industri Perikanan dan Eksportir serta Himpunan/organisasi non pemerintah/LSM/NGO diharapkan hadir dengan pendanaan dari lembaga/organisasi/perusahaan masing-masing.

Lainnya:

1. Peserta yang berasal dari luar provinsi Sulawesi Utara, kota Bitung dan Minahasa harap memberikan konfirmasi kehadiran kepada Sdr. Karel Yerusa - MDPI (+62 82340893920) Sdri. Nuriasih Nababan – AP2HI (+62 85216042493) dan Ibu Rut-DKP (+62 853-4353-3500) karena berkaitan dengan penyediaan tiket pesawat/kapal dan akomodasi penginapan peserta. Khusus pemesanan tiket pesawat akan dilakukan melalui agen travel yang ditunjuk MDPI.
2. Check-in hotel dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2025, jam 14:00 dan check-out tanggal 27 Agustus 2025 pada jam 12:00 waktu setempat.
3. Transportasi lokal yang diberikan adalah transportasi regular (bukan sewa mobil) pergi dan pulang, yang akan dibayarkan saat kegiatan selesai.
4. Uang harian akan diserahkan di akhir kegiatan
5. Konsumsi yang disediakan panitia untuk seluruh peserta adalah:
 - o Makan siang
 - o 2 kali coffee break
6. Bagi peserta yang hadir namun tidak tercantum dalam undangan kegiatan atau melebihi jumlah daftar undangan, maka panitia tidak menanggung pembiayaan apapun.